

**PROFIL INVESTASI SWASTA DAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) EMPAT
KABUPATEN DI PULAU MADURA
(BANGKALAN,SAMPANG,PAMEKASAN,SUMENEP)**

Didin Fatihudin

Fakultas Ekonomi-Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail : dfatihudin@yahoo.co.id

Abstract

Indicators of economic success of a region one of which is economic growth. Economic growth is meaningless if not accompanied by an increase in the welfare of society, whether in education, health, and purchasing power. Accumulation of capital is very important in encouraging economic growth of four districts on the island of Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep). Private investment and government investment has a multiplier effect on economic growth, employment and national income. National income can be evaluated from three aspects, namely production, income and expenditure. National income can be affected by consumption, investment, government spending and net exports. The potential of natural, cultural community, the readiness of the bureaucracy, labor quality, investment climate affect economic growth and prosperity. This study tries to analyze the profile of the realization of private investment, natural resources, the realization of government investment, economic growth and human development index from 2002 - to 2006 in four districts on the island of Madura as preliminary research that can be followed up by subsequent researchers a more detailed and can be tested quantitatively the link between variables.

Keyword: Private investment, public investment, economic growth, human development index.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Daerah ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas barang (*goods*) dan jasa (*services*) dalam kurun waktu tertentu (Sen dalam Pressman,2000:274). Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan nasional, yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya. Besar harapan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Tentunya saja mendorong pertumbuhan ekonomi itu tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi bergantung banyak hal, antara lain mulai dari potensi ekonomi negara yang bersangkutan, sumberdaya alam misalnya pertambangan emas, tembaga, batubara, nikel, gas dan minyak bumi, iklim, udara, laut dan kesuburan tanah. Tak kalah

penting sumberdaya manusia yang dimiliki baik segi kuantitas maupun kualitasnya. Seberapa besar modal yang dimiliki negara tersebut untuk membiayai pembangunan ekonomi dan investasinya di masa mendatang. Seberapa tinggi inovasi teknologi yang dapat dikembangkan untuk menciptakan efisiensi proses produksi. Namun harus diingat bahwa untuk mencapai kesejahteraan penduduk itu tidak cukup hanya dipenuhi oleh pertumbuhan barang dan jasa saja, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perlu pemenuhan hal-hal lain secara simultan, terutama kebutuhan pendidikan (*education*), pemenuhan kesehatan (*health*) dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat (*income*). Arti pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki arti yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi. Sukirno (2007:10) pembangunan ekonomi (*economic development*) adalah pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan-perubahan (*change*). Abipraja (1993:1) pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Tidak mudah untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah. Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang ada di suatu daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga akan terus tumbuh menjadi sumber penghidupan rakyat, dan kesejahteraan masyarakat, bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara mandiri, keseluruhan dan berkesinambungan. Potensi ekonomi dengan realitas ekonomi sering berbeda. Memang potensi ekonomi sumber daya alam yang kurang atau memang salah kelola, sehingga realitas ekonomi sering berbeda dan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan potensi ekonomi yang sesungguhnya. Di samping itu juga kondisi sosial-politik suatu negara atau daerah sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Indonesia diperlukan memiliki modal (*capital*) yang besar untuk investasi. Peningkatan modal itu dapat dilakukan, pertama, mencoba mengoptimalkan sumberdaya potensi ekonomi yang dimiliki terlebih dahulu lalu di arahkan pada investasi yang lebih menguntungkan secara finansial. Kedua, kalau modal tersebut masih kurang atau tidak ada sama sekali dengan terpaksa meminjamnya dari pihak lain. Itu suatu hal yang wajar dalam perekonomian, yang penting bagaimana cara mengelola pinjaman itu dengan baik dan efisien. Pokok pinjaman dan suku bunga dapat terbayar tepat waktu, dapat mendatangkan keuntungan (*profit*) secara ekonomi-sosial dalam jangka panjang. Sebelum melakukan investasi, baik pemerintah pusat/daerah maupun investor swasta harus mampu memikirkan terlebih dahulu seperti hal berikut ; investasi apa yang dapat dikembangkan, siapa saja yang akan melakukan, bagaimana caranya, kapan waktunya yang tepat dilaksanakan, di mana lokasinya dan yang lebih penting adalah dari mana dan seberapa besar modal (*capital*) yang diperlukan untuk investasi tersebut. Dalam hal ini peran pemerintah dan swasta sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah dalam perekonomian modern memiliki tiga peran ; pertama peran alokasi, kedua peran distribusi, dan ketiga peran stabilisasi (Mangkoesoebroto,2001:2). Pembangunan ekonomi Jawa Timur merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah daerah melalui otonomi daerah harus mampu mengatur sumberdaya yang ada, memberi kesempatan peningkatan partisipasi masyarakat serta jaminan keamanan di daerahnya demi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Perbandingan PDRB Jawa Timur dan Indonesia atas dasar harga konstan 2000, dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dalam jutaan rupiah, menunjukkan bahwa PDRB Jawa Timur memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13 persen setiap tahun atau sebesar 243.035.805 juta rupiah kepada PDRB Indonesia dari 35 Provinsi di Indonesia (BP:2007).

Secara logis sebenarnya jika pemerintah daerah dan para pengusaha memiliki komitmen yang sama untuk mensejahterakan masyarakat sebenarnya tidaklah sulit. Terasa kurang menguntungkan jika kedua belah pihak selalu mengutamakan kepentingan masing-masing. Itu yang tidak dikehendaki oleh bersama. Memang orientasi kegiatannya berbeda antara tujuan pemerintah (*public/social investment*) dengan tujuan swasta (*profit/private investment*). Tetapi sebenarnya bisa bekerjasama secara *simultan*. Bagi pemerintah secara birokrasi jangan mempersulit para pengusaha untuk berinvestasi di daerahnya dari mulai iklim investasi, persyaratan administrasi sampai dengan perijinan. Bagi investor swasta harus taat pada semua aturan yang telah ditentukan pemerintah, misalnya mengenai laporan perkembangan usahanya secara periodik kepada pemerintah, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan berikutnya. Secara akselerasi kegiatan pengeluaran pemerintah melalui belanja modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun investasi swasta melalui domestik/asing tujuannya adalah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Mengkaji profil investasi swasta dan investasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk dilakukan, karena variabel investasi swasta dan pemerintah ini memiliki dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang khususnya di empat kabupaten di Pulau Madura. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan sumber data oleh Pemda empat Kabupaten di Pulau Madura Prov.Jawa Timur dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi sehingga dapat menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah yang tepat bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Kajian Teori

Pembangunan ekonomi menurut Kuznets dan H.B. Chenery dalam Mahyudi (2004:1) dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadinya perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya

pertambahan/perubahan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Sukirno (2006:3) Pembangunan ekonomi secara umum diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Baldwin dan Meier dalam Abipraja (1993:1); *economic development is a process where by an economy's real national income over a long period of time*. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pendapatan nasional riil suatu perekonomian meningkat selama kurun waktu yang panjang, jika tingkat pembangunan itu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan riil per kapita akan bertambah. Abipraja (1993:1) menjelaskan pembangunan ekonomi adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk masyarakat, meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi mempunyai tiga unsur penting, yaitu ; (a) suatu proses (perubahan yang terjadi terus menerus) ; (b) usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita ; (c) kenaikan pendapatan per kapita terus berlangsung dalam jangka panjang.

Teori Pembangunan ekonomi Adam Smith (Mahyudi,2004:165), pembangunan lebih menekankan faktor produksi modal dan pemilik modal (kapitalis), karena pemilik modal mampu mengakumulasi modal yang diperoleh dari laba atau keuntungan usaha untuk kemudian ditanamkan kembali sebagai perluasan atau tambahan produksi dan kapasitas produksi perusahaan. Menurut Smith dalam Deliarnov (2005:37) menganggap penting akumulasi capital bagi pembangunan ekonomi. Cara terbaik melakukan investasi, yakni membeli mesin-mesin dan peralatan. Adanya mesin modern/canggih, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas mengakibatkan peningkatan produksi perusahaan. Jika perusahaan melakukan hal yang sama, maka *output* nasional, yang juga berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Para pekerja yang dianggap tidak mampu mengakumulasi modal dan tidak memiliki tabungan karena hanya berasal dari upah para pekerja yang habis hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Lebih jelas dalam Abipraja (1993:46) menurut Adam Smith, terjadinya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja (*division of labor*), karena dengan adanya spesialisasi produktivitas tenaga kerja menjadi meningkat sehingga dapat menambah kemahiran tenaga kerja, lebih efisien waktu produksi, dan adanya penemuan alat/mesin produksi yang lebih baik. Ini biasa terjadi jika ada akumulasi modal terlebih dahulu yang berasal dari tabungan dan pasar yang semakin meluas.

Teori Pembangunan JM Keynes berbeda dengan Adam Smith (Mahyudi,2004:166) yang hanya menganggap pembangunan ekonomi dapat dilakukan oleh kelompok kapitalis (pengusaha/wiraswasta) saja dan juga tidak terlalu ekstrem, seperti teori pembangunan Karl Max yang hanya mementingkan para pekerja. Teori pembangunan campuran JM Keynes yang berusaha menggabungkan kedua paham teori pembangunan antara kapitalisme dan sosialisme, mengajukan peranan pemerintah untuk dapat memajukan perekonomian suatu negara, misalnya di Indonesia melalui APBN, aturan-aturan atau regulasi yang cenderung membela masyarakat atau pengusaha kecil, mekanisme pasar modal dan lain-lain. Schumpeter dalam Abipraja (1993:54) memiliki keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Dalam pembangunan yang memegang peranan penting adalah golongan pengusaha (*entrepreneur*) yang inovatif, yaitu golongan masyarakat yang dapat mengorganisasikan dan menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang keperluan masyarakat. Pengusaha menciptakan pembaharuan inovasi dalam perekonomian.

Menurut Todaro (1999:124-130) menyebutkan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yakni ; pertama, akumulasi modal, ; kedua, pertumbuhan penduduk, dan ; ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal (*capital accumulation*) meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal sumberdaya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar *output* atau pendapatan dikemudian hari. Menurut Sen dalam Pressman (2000:274-275) menyatakan bahwa pertumbuhan berarti memproduksi lebih banyak barang dan jasa terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut.. Perkembangan ekonomi meliputi pengembangan kemampuan manusia. Pertumbuhan ekonomi menaikkan pendapatan per kapita, sementara perkembangan ekonomi meningkatkan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Menurut Harrod-Domar dalam Tambunan (2001:46) bahwa pengeluaran pemerintah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi terutama peranan investasi memiliki dampak positif melalui proses pengganda (*multiplier effect*) terhadap permintaan agregat dan juga pada penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, investasi yang dilakukan akan menambah *stok capital*. Setiap penambahan *stok capital* masyarakat akan meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan output. Keadaan ini berarti adanya peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah produktivitas. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya juga akan semakin besar, namun positif atau negatifnya penambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan

jumlah angkatan kerja. Bagi kebanyakan ekonomi, terutama kalangan teknokrat mengasumsikan bahwa kemajuan teknologi (*technological progress*) merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Pengertian yang paling sederhana bahwa kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara-cara lama dengan menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Sukirno (2006:10) menyatakan bahwa cara mudah untuk membedakan arti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dengan ungkapan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (*economics growth*) ditambah dengan perubahan (*change*). Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai di mana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara telah meningkat, tidak mudah diukur hanya secara kuantitatif. Berbagai data perlu dikemukakan untuk menunjukkan prestasi pembangunan yang dicapai suatu negara.

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian suatu negara/daerah. Besar kecilnya investasi yang direalisasikan dalam suatu negara dapat berpengaruh pada besar kecilnya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Menurut Meier dalam Kajian Ekonomi Regional (2007:6) menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif. Akan tetapi dalam dunia nyata, investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasinya. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal bagi perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang/jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang/jasa di masa yang akan datang. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah suku bunga, ekspektasi mengenai kegiatan ekonomi di masa depan, dan kemajuan teknologi (Sukirno,2000:106). *Public investment* adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, investasinya diarahkan untuk melayani atau menciptakan kesejahteraan rakyat banyak. *Private investment* ; adalah investasi yang dilaksanakan oleh swasta, motif keuntungan di masa depan sangat berperan dalam menentukan volume investasi. *Domestic investment*

adalah penanaman modal dalam negeri di dalam negeri. dan *Foreign investment* adalah penanaman modal asing. Negara yang banyak memiliki banyak faktor produksi alam (*natural resources*) dan atau manusia (*human resources*), tetapi tidak memiliki banyak modal (*capital*), maka akan mengundang pemodal asing, agar sumber daya tersebut dapat dioptimalkan.

Samuelson (2004:140) kekuatan yang berada di balik keputusan investasi sebagai berikut ; Bisnis berinvestasi untuk memperoleh laba. Karena barang dan modal dapat bertahan bertahun-tahun. Keputusan investasi bergantung pada ; Pertama, permintaan untuk *output* yang dihasilkan oleh investasi baru ; Kedua, suku bunga dan pajak yang mempengaruhi biaya investasi, dan Ketiga, ekspektasi bisnis mengenai keadaan perekonomian. Bahwa komponen dari investasi itu bisa berupa investasi sosial, investasi pemerintah, dan investasi tidak berwujud dalam bentuk investasi modal manusia dan peningkatan pengetahuan. Mengapa Pemerintah daerah berinvestasi, tentu berharap bahwa keputusan investasi itu akan memberikan laba (*profit*), yakni akan membawa hasil yang lebih besar daripada biaya investasi (*cost*). Samuelson juga menyatakan ada tiga elemen penting penentu berinvestasi ; Pertama, hasil (*revenue*); Kedua, biaya (*cost*), dan ; Ketiga, ekspektasi (*expectation*). Penentu pertama, Investasi akan memberikan kepada pemerintah daerah hasil tambahan jika investasi dapat membantu pemerintah daerah lebih banyak menghasilkan produk. Ini mengisyaratkan bahwa keseluruhan *output* (atau GDP) akan merupakan penentu penting dari investasi. Investasi di daerah akan bergantung pada *revenue* yang akan dihasilkan oleh aktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Penentu kedua dari investasi itu adalah biaya berinvestasi. Para investor seringkali mengumpulkan dana untuk membeli barang-barang modal dengan cara meminjam. Biaya pinjaman ini biasanya berupa suku bunga. Suku bunga merupakan harga yang dibayar untuk meminjam uang untuk suatu periode waktu tertentu. Pajak juga berpengaruh penting terhadap investasi. Jika suku bunga pinjaman dan tarif pajak diturunkan, maka respon dari para investor akan ramai-ramai meningkatkan investasinya di berbagai sektor sesuai yang diinginkan pemerintah daerah.

Rijal dalam Halim (2007:115) menyatakan bahwa investasi sektor publik sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah daerah dalam investasi bisa menciptakan *multiplier effect* yang mendorong investor swasta untuk berbisnis yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan. Selain itu sebagai *regulator* pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan pelayanan dan proses perizinan yang cepat tanggap. Secara kelembagaan diperlukan penataan kembali terhadap institusi yang ada dan terlibat dalam proses penciptaan iklim investasi yang baik, mulai dari lembaga pelayanan dan perizinan satu atap (*one stop service/OSS*) sampai proses akuntansi yang baik dan menguntungkan daerah. Pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam bentuk belanja modal yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat di daerah. Permendagri No.13/2006 dan No.59/2007 menyebutkan Belanja Modal adalah pengadaan asset tetap berwujud dan memiliki manfaat lebih

dari 12 bulan (satu tahun). Belanja Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan menurut SAP-2005 dalam Halim (2007:113-114) ; Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (SAP-2005). Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama : Tanah, Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan ; Jalan, Irigasi dan Jaringan ; dan Fisik lainnya.

Todaro, (2004:68) melihat keberhasilan pembangunan, UNDP mencoba memeringkatkan negara-negara di dunia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari skala 0 (terendah) hingga 1 (tertinggi). Pemingkatan tersebut berdasarkan tiga tujuan akhir produk pembangunan ; pertama, masa hidup (*longevity*) merupakan dimensi kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup ; kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah (sepertiga) ; Ketiga, standar kehidupan (*standar of living*) yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun dari pendapatan. Teori Indeks Kualitas Hidup (*Physical Quality Life Index (PQLI)* dari Morris D. Morris. PQLI merupakan indeks komposit (gabungan) dari tiga indikator, yaitu ; (1) tingkat harapan hidup pada usia satu tahun ; (2) angka kematian, dan (3) tingkat melek huruf.

Metode Penelitian

Materi kajian dalam analisisnya dibatasi hanya untuk mengetahui bagaimana kontribusi investasi swasta, pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di empat kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep dari tahun 2002 hingga 2006. Kajian ini sebagai implementasi UU Otda No.32 dan No.33/2004 yang diberlakukan tahun 2001. Data yang digunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur tahun 2007. Metode yang digunakan ekplanatori dan kepustakaan yang menjelaskan data yang ada kemudian di analisis untuk pengambilan kesimpulan.

Hasil Studi

Sumber daya alam (*land/nature*) merupakan salahsatu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah disamping akumulasi modal (*capital*) dan ketersediaan tenaga kerja (*labour*). Begitu pula Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting artinya bagi pembangunan ekonomi kaitannya dengan ketenagakerjan suatu daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Di bawah ini akan dideskripsikan hasil pengumpulan data yang telah diolah dari masing variable ; investasi swasta, investasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) dari keempat kabupaten di Pulau Madura

Provinsi Jawa Timur ; Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.

1. Investasi Swasta (Domestik-Asing) (*Private Investment*)

Tabel 1
NILAI REALISASI INVESTASI SWASTA EMPAT KABUPATEN DI PULAU MADURA
TAHUN 2002 HINGGA 2006 (Dalam Rupiah dan \$US)

KABUPATEN	T A H U N								
	2002		2003		2004		2005		PMDN
	PMDN	PMA (\$US)	PMDN	PMA(\$US)	PMDN	PMA(\$US)	PMDN	PMA(\$US)	
Bangkalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sampang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.00
Pamekasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sumenep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	
Rer ata Jatim	26.997,18	2.988,92	37.797,68	12.017,82	144.048,95	9.414,76	142.130,68	14.316,53	4.405.61
Jawa Timur	1.025.893,00	113.579,00	1.436.312,00	456.677,00	5.473.860,00	357.761,00	5.400.966,00	544.028,00	167.413.27

Sumber : BKPM Jakarta dan BPS-JATIM, diolah (2007)

Nilai realisasi investasi swasta (Domestik-Asing) di Pulau Madura pada periode penelitian 2002-2006 nampak bahwa hanya modal asing (Asing) di Kab.Sumenep pada tahun 2004 sebesar 2.420 \$US atau setara 21.780.000 milyar rupiah bila nilai tukar 1 dollar 9000 rupiah, dan di Kab.Sampang modal domestik (Domestik) tahun 2006 sebesar empat milyar rupiah saja. Tidak ada nilai investasi swasta baik domestik maupun asing yang direalisasikan dan ditanam di Kab. Bangkalan dan Kab.Pamekasan. Bila dibandingkan dengan rata-rata nilai realisasi investasi swasta di Provinsi Jawa Timur, keempat kabupaten di Pulau Madura ini jelas di bawah rata-rata provinsi. Untuk mengetahui potensi sumberdaya alam dan peluang investasi *pertambangan minyak dan gas, Pertanian, Pariwisata* 4 kabuten di pulau Madura menurut lokasi pengembangan dan potensi unggulan dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini.

Tabel 2
PELUANG INVESTASI *PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS* EMPAT
KABUTEN DI PULAU MADURA MENURUT LOKASI PENGEMBANGAN
DAN POTENSIUNGGULAN

WILAYAH PENGEMBANGAN	LOKASI KAB/KOTA	POTENSI UNGGULAN
VII	Kab.Bangkalan	Phospat, Batu Gamping, Dolomit, Pasir Kwarsa, dan Kalsit.
	Kab.Sampang	Phospat dan Batu Gamping.
	Kab.Pemekasan	Batu Bata Putih, Pasir Kwarsa, Phospat, Gas dan Minyak Bumi.
	Kab.Sumenep	Batu Gamping, Dolomit, Pasir Kwarsa, Phospat, Gas dan Minyak Bumi.

Sumber : BPM Provinsi Jawa Timur 2007 (diolah)

Tabel 3
 PELUANG INVESTASI *PERTANIAN* EMPAT KABUPATEN DI PULAU
 MADURA

MENURUT LOKASI PENGEMBANGAN DAN POTENSI UNGGULAN

WILAYAH PENGEMBANGAN	LOKASI KAB/KOTA	POTENSI UNGGULAN
VII	Kab.Bangkalan	Padi, Jagung, Kedelai, Ubi kayu, Kacang tanah, Cabe, Pisang dan Melati.
	Kab.Sampang	Padi, Jagung, Kedelai, Ubi kayu, Pisang, Jambu air, dan Temuireng.
	Kab.Pamekasan	Padi, Jagung, Ubi kayu, Jahe, Lengkuas, Temulawak, cabe, Durian dan Pisang.
	Kab.Sumenep	Padi, Jagung, Ubi kayu, Cabe Jamu, Mangga dan Pisang.

Sumber : BPM Provinsi Jawa Timur 2007 (diolah)

Tabel 4
 PELUANG INVESTASI *PARIWISATA (ALAM, BUDAYA, AGAMA)* EMPAT
 KABUPATEN DI PULAU MADURA MENURUT LOKASI PENGEMBANGAN
 DAN POTENSI UNGGULAN

WILAYAH PENGEMBANGAN	LOKASI KAB/KOTA	POTENSI UNGGULAN
VII	Kab.Bangkalan	Pantai Siring Kemuning, Makam Ratu Ebhu dan Kerapan sapi.
	Kab.Sampang	Pantai Camplong, Hutan Nipah, Waduk Kalmpis dan Kerapan sapi.
	Kab. Pamekasan	Pantai talang Siring, Api Tak Kunjung Padam, Pantai Jumiang, pantai batu Kerbul dan Kerapan Sapi
	Kab.Sumenep	Pantai Lobang, Pantai Slopeng, Pulau Mamburit, Taman laut, Keraton dan Musium Makam Astatenggi

Sumber : BPM Provinsi Jawa Timur 2007 (diolah)

Bila mengamati Tabel 2, 3 dan 4 di atas sebenarnya empat kabupaten di Pulau Madura memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak dan dapat dijadikan peluang investasi di masa mendatang seperti minyak bumi dan Gas di Kab. Sumenep dan Pamekasan. Kedelai, Jagung dan pisang hampir di semua kabupaten ada. Begitu pula pada sektor pariwisata yang dapat meningkatkan PAD seperti kerapan sapi di seluruh kabupaten, pantai

slopeng di Sumenep, Api tak kunjung padam di Kab.Pamekasan. Potensi ala ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah kabupaten di Pulau Madura.

2. Investasi Pemerintah (*Public Investment*).

Tabel 5
REALISASI INVESTASI PEMERINTAH EMPAT KABUPATEN DI PULAU MADURA
TAHUN 2002 HINGGA 2006(Dalam Jutaan Rupiah)

KABUPATEN	T A H U N				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bangkalan	54.144.558.698,00	49.612.698.485,00	4.566.957.751.338,00	59.365.124.361,00	106.481.197.923
Sampang	6.959.097.364.270,00	103.699.523.138,00	1.552.755.308,00	104.657.230.900,00	109.364.210.394
Pamekasan	55.548.680.394,00	86.025.849.358,00	49.211.289.867,00	66.711.050.619,00	9.955.412.261.640
Sumenep	313.482.240.845,00	12.474.921.648.955,00	1.598.746.829.652,00	78.551.754.854,00	5.537.905.622.887
Rerata Jatim	1.145.591.159.906,66	4.228.844.339.705,45	1.230.817.557.953,18	707.523.617.499,58	1.824.737.996.420
Jawa Timur	43.532.464.076.453,20	160.696.084.908.807,00	46.771.067.202.221,00	26.885.897.464.984,00	69.340.043.863.972

Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur diolah (2007)

Realisasi belanja modal pemerintah daerah empat kabupaten di Pulau Madura menunjukkan bahwa keempat kabupaten secara bervariasi masing-masing belanja modal kabupaten setiap tahunnya ada yang naik ada yang turun. Pada tahun 2002 paling tinggi Kab.Sampang, tahun 2003 kab.Sumenep, tahun 2004 Kab.Bangkalan, tahun 2005 Kab.Sampang dan tahun 2006 kab.Pamekasan. Bila diamati dari jumlah nilai belanja modal yang direlasisasikan Pemda melalui APBDnya pada umumnya keempat kabupaten tersebut tidak ada yang secara konsisten setiap tahunnya terus meningkat

3. Pertumbuhan Ekonomi (*Economics Growth*)

Tabel 6
NILAI TAMBAH STRUKTUR PDRB ATAS HARGA KONSTAN 2000
EMPAT KABUPATEN DI PULAU MADURA TAHUN 2002 HINGGA 2006(Dalam persen)

KABUPATEN	2002			2003			2004			2005			2006	
	Primer	Sek	Tersier	Primer	Sek									
Bangkalan	39,80	10,24	49,95	38,17	10,7	51,15	37	11,01	52	35,33	11,59	53,07	34,01	11,89
Sampang	53,26	15,05	31,65	53,14	14,55	32,31	52,92	13,83	33,24	52,2	13,81	33,99	51,76	13,48
Pamekasan	57,16	7,78	35,05	57,14	7,68	35,18	56,61	7,6	35,8	56,1	7,6	36,3	55,91	7,49
Sumenep	58,26	10,75	31	58,01	11,06	30,9	58,08	11,04	30,91	57,83	11,12	31,05	57,09	11,67
Rerata Jatim	29,37	24,66	46,76	28,74	24,37	47,41	28,23	23,48	46,88	27,53	23,72	48,76	27,07	23,34
Miin.Jatim	0,20	7,78	24,30	0,19	7,68	25,11	0,19	7,60	25,92	0,18	7,60	27,39	0,18	7,49

Sumber : BPS, BAPPEPROP Jawa Timur, Kabupaten/Kota, diolah (2007)

Nilai Tambah PDRB atas harga konstan 2000 di empat kabupaten di pulau Madura menunjukkan Kabupaten Bangkalan pertumbuhan ekonomi secara konsisten mulai tahun 2002 hingga 2006 sektor tersier lebih tinggi dari sektor primer dan sektor sekunder. Sedangkan ketiga kabupaten lainnya seperti Kab.Sampang, Pamekasan dan Sumenep justru sektor primer-lah yang paling tinggi pertumbuhannya. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan

pertumbuhan ekonomi sektor modern lebih tinggi dibandingkan ketiga kabupaten lainnya.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia empat kabupaten di pulau Madura ini merupakan indeks komposit dari angka harapan hidup (rata-rata hidup/kesehatan), angka melek huruf (pendidikan) dan pendapatan per kapita (income) dari keempat kabupaten tersebut. Jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 7
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) EMPAT KABUPATEN
DI PULAU MADURA TAHUN 2002 HINGGA 2006

7.1. Angka Harapan Hidup/Usia (tahun)

KABUPATEN	2002	2003	2004	2005	2006
Bangkalan	62,32	62,32	62,40	62,00	62,20
Sampang	57,83	57,83	58,55	59,80	60,10
Pamekasan	62,67	63,67	64,45	62,20	62,45
Sumenep	61,06	61,06	62,20	63,40	63,65
Rata-rata Jatim	64,91	65,04	66,95	66,93	67,13
Prov.Jawa Timur	66,50	66,80	67,20	67,90	68,25

Sumber : BPS Jawa Timur, diolah (2007)

Usia harapan hidup masyarakat dari Keempat kabupaten di pulau Madura yang terendah adalah masyarakat Kab.Sampang rata-rata 57 tahun, sedangkan sedikit diatasnya usia 62 tahun sampai dengan usia 63 tahun Sumenep dan Pamekasan dan Bangkalan. Tetapi bila dibandingkan dengan rata-rata usia masyarakat kab/kota di Jawa Timur keempat kabupaten di Pulau Madura usia harapan hidupnya masih jauh lebih rendah. Masyarakat kab/kota lainnya antara usia 66 tahun, 67 tahun dan 68 tahun. Usia yang lebih pendek bisa disebabkan karena gizi dan kesehatan yang rendah.

7.2. Angka Melek Huruf/Pendidikan (persen)

KABUPATEN	2002	2003	2004	2005	2006
Bangkalan	60,08	59,22	59,84	64,72	66,77
Sampang	41,28	42,00	48,47	50,93	50,07
Pamekasan	60,90	62,09	64,78	65,06	64,41
Sumenep	55,38	53,58	59,23	54,88	61,91
Rata-rata Jatim	67,76	68,55	71,69	72,77	73,24

Prov.Jawa Timur	69,82	70,02	70,92	72,24	72,81
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : BPS Jawa Timur, diolah (2007)

Angka melek huruf tertinggi Kab.Pamekasan dan Kab.Bangkalan di atas 56 persen hingga 66 persen, sedangkan angka melek huruf yang paling rendah adalah Kabupaten Sampang 40 hingga 50 persen saja. Lebih parah lagi bila dibandingkan dengan rata-rata melek huruf di Provinsi Jawa Timur, semua keempat Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep semuanya jauh di bawah persentasenya, yakni angka melek hurufnya mencapai 71 persen hingga 72 persen. Jadi tingkat penyerapan angka melek huruf dan pendidikan di Pulau Madura sangat rendah bila dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur.

7.3. Pendapatan Per Kapita (ribuan Rp)

KABUPATEN	2002	2003	2004	2005	2006
Bangkalan	3.305,80	3.727,28	4.020,71	4.594,47	5.403,67
Sampang	2.877,36	3.127,38	3.382,14	3.852,24	4.743,16
Pamekasan	2.809,86	3.078,90	3.364,45	3.836,51	4.143,48
Sumenep	5.200,39	5.556,03	5.968,29	7.332,59	7.755,34
Rata-rata Jatim	8.170,20	9.215,22	10.301,10	12.098,86	12.855,78
Prov.Jawa Timur	7.435,41	7.436,41	391.441,86	459.756,80	488.519,68

Sumber : BPS Jawa Timur, diolah (2007)

Pendapatan per kapita kabupaten di Pulau Madura Tertinggi Kab.Sumenep 5.556,03 hingga 7.755,34 juta rupiah, Kab.Bangkalan antara 3.305,80 juta rupiah hingga 5.403,67 juta rupiah per tahun. Sedangkan yang paling rendah adalah Kab. Sampang dan Pamekasan yakni antara 2.877,36 juta rupiah hingga 4.743,16 juta rupiah dalam setahun. Lebih parah lagi bila keempat Kabupaten di Pulau Madura ini dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita kab/kota lain di Provinsi Jawa Timur 8.170,20 juta rupiah hingga 12.855,78 juta rupiah per tahun dan Provinsi Jawa Timur mencapai angka 391.441,86 juta rupiah hingga 488.519,68 juta rupiah pertahun.

Adapun komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Keempat Kabupaten dari tahun 2002 hingga 2006 berikut ini :

KABUPATEN	2002	2003	2004	2005	2006
Bangkalan	59,11	59,35	59,69	61,73	62,23
Sampang	50,47	51,12	53,86	55,11	56,54
Pamekasan	60,21	61,04	62,55	63,04	64,14
Sumenep	55,00	55,30	58,31	60,78	61,18
Rata-rata Jatim	62,48	63,25	65,84	66,52	67,11
Prov.Jawa Timur	62,64	63,66	64,49	65,59	66,64

Sumber : BPS Jawa Timur, diolah (2007)

IPM tertinggi ditempati Kabupaten Pamekasan rata-rata indeksinya 60,21 hingga 64,14 saja, sedangkan paling rendah adalah Kabupaten Sampang. Tetapi secara keseluruhan keempat kabupaten di Pulau Madura IPMnya lebih rendah bila dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur yakni indeksinya antara 62,64 hingga 67,11. Ini menunjukkan bahwa IPM keempat kabupaten di Pulau Madura perlu ditingkatkan ke yang lebih baik lagi.

Pembahasan

Lahirnya UU Otda merupakan anugerah bagi Pemda kab/kota yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Tetapi sebaliknya bisa menjadi awal petaka bagi Pemda kab/kota yang minus sumberdaya alamnya. Tidak terkecuali Pemda empat kabupaten yang ada di pulau Madura (Bangkalan,Sampang,Pamekasan,Sumenep), entah Otda tersebut merupakan anugerah atau awal petaka bagi bagi Pemda kabupaten tersebut. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara gamblang lewat studi profil realitas investasi swasta dan pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di empat kabupaten di Pulau Madura ini. Memang pertumbuhan ekonomi belum bisa dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah, apalagi daerah tersebut masih tergolong memiliki sumberdaya yang masih rendah. Terbatas sumberdaya alam dan manusianya. Lebih tepatnya bagi daerah berkembang adalah pembangunan ekonomi, yakni bertambahnya barang dan jasa yang diikuti perubahan peningkatan di bidang lain seperti adanya peningkatan secara kuantitas maupun kualitas seperti Penduduk/tenaga kerja dengan cara memperbanyak lembaga pendidikan dan keterampilan, peningkatan gizi dan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Tidak kalah pentingnya keamanan dan rasa tentram masyarakat. Oleh karena itu sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, inovasi teknologi dan akumulasi modal. Pendapatan yang melebihi tingkat konsumsi akan mendorong pada peningkatan tabungan dan investasi masyarakat.

Sesuai dengan teori pembangunan ekonomi dari Sukirno (2006:3) Pembangunan ekonomi secara umum diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Baldwin and Meier(1993:1); *economic development is a process where by an economy's real national income over a long period of time*. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pendapatan nasional riil suatu perekonomian meningkat selama kurun waktu yang panjang, jika tingkat pembangunan itu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan riil per kapita akan bertambah. Berdasarkan data empiris di empat kabupaten di Pulau Madura ini sebenarnya keempat kabupaten tersebut banyak memiliki potensi ekonomi untuk investasi

di daerahnya. Tetapi bila mengamati Tabel 1 tentang realisasi investasi swasta domestik maupun asing sangat minim bahkan boleh dikatakan tidak ada. Nampak nilai realisasi investasi swasta (Domestik-Asing) di Pulau Madura pada periode penelitian 2002-2006 nampak bahwa hanya modal asing (Asing) di Kab.Sumenep pada tahun 2004 sebesar 2.420 \$US atau setara 21.780.000 milyar rupiah bila nilai tukar 1 dollar 9000 rupiah, dan di Kab.Sampang modal domestik (Domestik) tahun 2006 sebesar empat milyar rupiah saja. Tidak ada nilai investasi swasta baik domestik maupun asing yang direalisasikan dan ditanam di Kab. Bangkalan dan Kab.Pamekasan. Bila dibandingkan dengan rata-rata nilai realisasi investasi swasta di Provinsi Jawa Timur, keempat kabupaten di Pulau Madura ini jelas di bawah rata-rata provinsi. Walaupun potensi sumberdaya alam dan peluang investasi *pertambangan minyak dan gas, Pertanian, Pariwisata* keempat kabupaten di pulau Madura memiliki potensi unggulan (Tabel 2, 3 dan Tabel 4). Sebenarnya empat kabupaten di Pulau Madura memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak dan dapat dijadikan peluang investasi di masa mendatang seperti minyak bumi dan Gas di Kab. Sumenep dan Pamekasan. Kedelai, Jagung dan pisang hampir di semua kabupaten ada. Begitu pula pada sektor pariwisata yang dapat meningkatkan PAD seperti karapan sapi di seluruh kabupaten, pantai slopeng di Sumenep, Api tak kunjung padam di Kab.Pamekasan. Potensi alam ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah kabupaten di Pulau Madura. Tenaga kerja dan teknologi memiliki peran yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. maka logislah bila pertumbuhannya rendah. Menurut Todaro (1999:124-130) menyebutkan ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap daerah, yakni ; pertama, akumulasi modal, ; kedua, pertumbuhan penduduk, dan ; ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal (*capital accumulation*) meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal sumberdaya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar *output* atau pendapatan dikemudian hari.

Bila diamati dari jumlah nilai belanja modal yang direlasisasikan Pemda melalui APBDnya pada umumnya keempat kabupaten tersebut tidak ada yang secara konsisten setiap tahunnya terus meningkat, walaupun rata-rata meningkat, tetapi investasi pemerintah ini lebih banyak *capital intensive* belanja infrastruktur dan kepentingan fasilitas umum, sehingga sangat sedikit pada penyerapan tenaga kerja. Bila mengamati secara realitas dari keempat kabupaten tersebut secara infrastruktur masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan kab/kota lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. Begitu pula bila melihat data nilai tambah PDRB atas harga konstan 2000 di empat kabupaten di pulau Madura menunjukkan Kabupaten Bangkalan pertumbuhan ekonomi secara konsisten mulai tahun 2002 hingga 2006 sektor tersier lebih tinggi dari sektor primer dan sektor sekunder. Sedangkan ketiga kabupaten lainnya seperti Kab.Sampang, Pamekasan dan Sumenep justru sektor primerlah yang paling tinggi pertumbuhannya. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan pertumbuhan ekonomi sektor modern lebih tinggi dibandingkan ketiga kabupaten lainnya. Secara umum keempat kabupaten tersebut masih

berada pada sektor primer-tradisional. Oleh karena itu agar diupayakan struktur ekonominya bisa bergeser menuju sektor semi modern-sekunder bahkan kalau memungkinkan lebih cepat lagi menuju kegiatan ekonomi tersier.

Investasi swasta, investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berubah menjadi lebih baik, bila kualitas sumberdaya manusianya tidak ditingkatkan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa realitas indeks pembangunan manusia (IPM) yang ada di keempat kabupaten di Pulau Madura ini sangat rendah, misalnya usia harapan hidup di kab. Sampang hanya 59 tahun dan yang paling tinggi di Kab.Sumenep hanya 63 tahun saja. Padahal rata-rata usia di Jawa Timur secara keseluruhan mencapai usia antara 67 tahun hingga 68 tahun. Di Jawa Timur saja empat kabupaten tersebut usia harapan hidupnya paling rendah. Begitu pula angka melek huruf dan pendidikan di Pulau Madura sangat rendah bila dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Tertinggi Kab.Pamekasan dan Kab.Bangkalan di atas 56 persen hingga 66 persen, sedangkan angka melek huruf yang paling rendah adalah Kabupaten Sampang 40 hingga 50 persen saja. Juga ditunjukkan dalam pendapatan per kapita kabupaten di Pulau Madura Tertinggi Kab.Sumenep hanya 5.556,03 hingga 7.755,34 juta rupiah, Kab.Bangkalan antara 3.305,80 juta rupiah hingga 5.403,67 juta rupiah per tahun. Indeks IPM kompositnya menunjukkan secara keseluruhan keempat kabupaten di Pulau Madura IPMnya lebih rendah bila dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur yakni indeksnya antara 62,64 hingga 67,11. Ini menunjukkan bahwa IPM keempat kabupaten di Pulau Madura perlu ditingkatkan ke yang lebih baik lagi. Memang kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur oleh pendapatan per kapita saja, akan tetapi banyak hal antara lain pendidikan, kesehatan, keamanan, air bersih, rumah tinggal, wisata, aktualisasi diri, penghargaan, status sosial dan lain sebagainya. Penyebab adanya ketimpangan pendapatan bisa saja diakibatkan oleh disparitas pendapatan, adanya dominasi kepemilikan faktor-faktor produksi oleh para konglomerat (istilah Paul Baran ; borjuis/komparador) atau keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat yang timpang. Pendidikan/skill yang rendah menyebabkan produktivitas rendah, upah rendah, keterampilan tidak sesuai lapangan pekerjaan yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja selalu timpang dengan ketersediaan tenaga kerja. Pengangguran bertambah, kemiskinan meningkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja antara lain ; (a) tersedianya lapangan pekerjaan; (b) tingkat upah ; (c) kualitas tenaga kerja ; (d) komposisi tenaga kerja dan kuantitas tenaga kerja. Dimana saja pendapatan akan selalu diukur dengan kemampuan daya beli. Tidak artinya upah secara riil naik 10 persen, tetapi diikuti oleh inflasi sebesar 15 persen. Hakekatnya tidak ada kenaikan, bahkan defisit. Ini semua dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Teori Neoklasik/Keynesian campur tangan pemerintah sangat diharapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Implikasi kurva Lorenz dapat dijadikan instrumen dalam pemerataan hasil pembangunan. Ada empat kesempatan kerja di Indonesia antara lain ; perluas kesempatan kerja ; pemilihan produk dan

teknologi yang padat karya ; ada program khusus untuk menangani pengangguran dan perluasan lapangan kerja di daerah. Untuk menggairahkan investasi di Pulau madura, sebaiknya pemda setempat merubah iklim investasi dengan perda yang mendukung, kultur masyarakat yang siap menerima inovasi teknologi, kesiapan aparat birokrasi, adanya kepastian hukum dan lainnya.

Simpulan, Implikasi dan keterbatasan

Profil Investasi swasta, pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di empat Kabupaten Pulau Madura Prov.Jawa Timur masih perlu ditingkatkan dan terus diupayakan demi memacu kegiatan ekonomi serta tercapainya kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura. Sumberdaya alam yang dimiliki berpotensi dan berpeluang untuk eksplorasi dan eksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Khusus dalam peningkatan belanja modal pemerintah, diharapkan belanja modal tersebut dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil dan penyerapan tenaga kerja. Artinya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik, dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan benar-benar infrastruktur yang dapat mendorong terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, seperti akses jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, telepon, air untuk irigasi dan persawahan, pendirian pabrik dan aneka industri yang dapat menyerap tenaga kerja banyak serta mengurangi pengangguran.

Bila ingin mengkaji kontribusi investasi pada pertumbuhan ekonomi dan Indeks pembangunan manusia secara lengkap, kajiannya harus dilengkapi dengan akumulasi dana investasi yang disalurkan perbankan kepada para pengusaha di empat kabupaten di Pulau Madura. Diharapkan peneliti lain dapat mengkajinya dari sisi investasi modal produktif yang disalurkan perbankan.

Daftar Pustaka

- Abipraja,(1993), *Ekonomi Pembangunan Pengantar dan Kebijakan*, Cetakan Ketiga, Surabaya, Airlangga University Press.
- Badan Pusat Statistik,(2007), *Jawa Timur Dalam Angka*, Surabaya, BPS.
- Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur, 2007, Surabaya,BPM.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK./2004 Tanggal 20 Juli 2004 Tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, BKPM : Jakarta.
- Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur , 2009 : Surabaya.
- Deliarnov, (2005), *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* : Jakarta : Raja Grafindo.
- Daniri (2005), *Menyibak iklim Investasi Daerah* : Jakarta.
- Halim, Abdul, (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Cetakan kedua : Yogyakarta : UPP-YKPN.

- Halim, Abdul, Theresia Damayanti, (2007), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua, Cetakan pertama : Yogyakarta : UPP STIM-YKPN.
- Mahyudi,Ahmad,(2004), *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Meier, GM, (1995), *Leading Issues in Economic Development*, 3rd : New York, Oxford University Press.
- Mangkoesoebroto, Guritno, (2001), *Teori Ekonomi Makro* : Yogyakarta : STIE-YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007, Jakarta, Depdagri.
- Pressman, Steven,(2000), *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia* : Jakarta : PT Radja Grafindo.
- Sukirno, Sadono,(2000), *Makroekonomi Modern ; Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Samuelson, Nordhaus, (2003) *Microeconomics*, Terjemahan, Edisi ketujuh belas, Jakarta, PT Media Global Edukasi.
- Samuelson, Nordhaus,(2004) *Microeconomics*, Terjemahan, Edisi ketujuh belas : Jakarta : PT Media Global Edukasi.
- Sukirno, Sadono,(2006), *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan*, Edisi kedua : Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- ,(2007), *Ekonomi Makro: Perkembangan Pemikiran Ekonomi dari Klasik Hingga Keynesian* : Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P.,(1999), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga*, 1 dan 2 Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tambunan,Tulus,(2001), *Perekonomian Indonesia ; Beberapa Masalah Penting* : Jakarta : Ghalia.
- Todaro,Michael P.,and Smith Stepen,C,(2004), *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga*, 1 dan 2 ; Jakarta : Erlangga.
- Jhingan, M.L., (2007), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi keenam Belas, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- KPPOD(2001) *Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota ; Studi Kasus 90 Kab/Kota ; di 68 Kabupaten, 22 Kota dari 24 Propinsi di Indonesia* : Jakarta : Hasil Penelitian
- KPPOD, USAID dan The Asia Foundation,(2004) *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Persepsi Dunia Usaha*, KPPOD : Jakarta: Hasil Penelitian.
- KPPOD,USAID dan *The Asia Foundation*,(2007) Survey tentang Daya Tarik Investasi Daerah pada Pelaku Usaha dari 243 Kabupaten/Kota di 15 Provinsi di Indonesia : Jakarta : Hasil Penelitian.
- Lembaga Kajian Ekonomi Regional/LKER,(2007), *Survey Faktor-Faktor Non Ekonomi Yang Mempengaruhi Iklim Investasi Di Sulawesi Selatan* : Sulawesi Selatan : Hasil Penelitian.
- Undang-undang Otonomi daerah Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah